

Judul : Pro kontra kebijakan pembatasan beli BBM
Tanggal : Senin, 06 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pro Kontra Kebijakan Pembatasan Beli BBM

PEMERINTAH resmi menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar, dengan batas maksimum 50 liter per kendaraan per hari.
Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 1 April 2026, sebagai upaya mengatur distribusi BBM dan menjaga ketersediaan energi nasional.
Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik

di Timur Tengah, yaitu perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
"Terkait distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas batas wajar 50 liter per kendaraan," kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, Rabu (1/4/2026).
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalia menambahkan, dengan pembelian BBM sehari 50 liter adalah wajar dan bijak. "Mobil sehari 50 liter, tanki

sudah penuh. Kami mohon dilakukan dengan bijak," tegas Bahilil.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi BBM, termasuk membatasi pembelian BBM bersubsidi 50 liter per hari.
"Kita kan diminta melakukan efisiensi, saya rasa ini hal yang wajar, berkaitan dengan situasi global. Yang penting, Pemerintah sudah menegaskan bahwa untuk angkutan umum, angkutan logistik, truk-truk kan tidak ada pembatasan," kata Andre,

di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Anggota Komisi VI Herman Khaeron juga sepakat dengan adanya pembatasan BBM 50 liter perhari bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini perlu diantisipasi selama implementasinya sesuai perencanaan.
"Pembatasan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak boros dalam penggunaan BBM," kata Herman Khaeron saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, kemarin.
Tapi, pandangan berbeda diung-

kapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Nurzaman. Menurut dia, pembatasan pembelian BBM 50 liter sehari sangat memberatkan bagi pelaku usaha transportasi dan travel. "Kami keberatan," ungkap Nurzaman.
Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan dan pendapat Herman Khaeron dan Nurzaman terkait pembatasan pembelian BBM 50 liter perhari, berikut petikan wawancaranya.

HERMAN KHAERON
Anggota Komisi VI DPR

Pembatasan Ini Agar Masyarakat Tak Boros



“Jika dalam perjalanannya kebijakan ini menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan ini bisa dan harus dievaluasi.”

PEMERINTAH mengeluarkan kebijakan pembatasan pembelian BBM 50 liter perhari. Apa pandangan Anda?
Pembatasan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak boros dalam penggunaan BBM. Secara teori, batas 50 liter per hari masih memungkinkan aktivitas masyarakat berjalan normal. Kebijakan ini patut diapresiasi selama implementasinya sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan output yang diharapkan.

Tetapi, kebijakan pembatasan ini diprotes karena bisa menurunkan produktivitas?

Jika dalam perjalanannya kebijakan ini menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, atau mengganggu aktivitas masyarakat, maka kebijakan ini bisa dan harus dievaluasi. Pemerintah kemudian dapat mengeluarkan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran.

Saya masih ingat dulu pada waktu kebijakan minyak goreng. Dalam satu bulan bisa tiga kebijakan keluar. Karena masalah penutupan ekspor ternyata berdampak terhadap petani sawit. Begitu ekspor dibuka, ternyata sermua ekspor karena harga internasional lebih tinggi, kemudian domestik tidak kebagian. Ini seharusnya banyak hal yang dipertimbangkan, tetapi mendelet, ya kebijakan bisa diubah.

Intinya, kebijakan ini bisa diubah, ya?

Kalau kebijakan 50 liter pembatasan ini ternyata mengakibatkan hal yang kurang positif terhadap rakyat kita, terhadap bangsa kita, ya kita bisa evaluasi dan kemudian dikeluarkan kebijakan baru.

Mengapa pembatasan konsumsi juga berkaitan dengan keamanan stok BBM?

Indonesia memproduksi minyak mentah sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 1,5 juta barel per hari. Sisa kebutuhan dipenuhi dari impor. Karena jalur impor terganggu akibat penutupan Selat Hormuz, Pertamina harus menjaga cadangan BBM minimal 20-25 hari ke depan. Pembatasan konsumsi menjadi strategi untuk menjaga durasi aman stok tersebut.

Bagaimana dampaknya terhadap harga dan asumsi APBN?

Asumsi APBN menetapkan harga minyak mentah di level 70 dolar AS per barel, namun saat ini sudah menyentuh USD 110 per barel. Selisih ini memaksa pemerintah merevisi strategi fiskal. Kemungkinan harga crude oil juga mendorong harga BBM bersubsidi. Kita akan berupaya menjaga logistik secara keseluruhan. ■ REN

NURZAMAN
Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta

Aturan Ini Memberatkan Para Pelaku Usaha



“Pemerintah melalui bapak Presiden berharap ada pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kalau kami dibatasi, maka dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan itu tidak tercapai.”

APA respons Anda terkait kebijakan Pemerintah yang membatasi pembelian minyak bersubsidi sebanyak 50 liter perhari?

Tentu, kalau dari sisi perusahaan dan dari sisi kaca mata bisnis, pembatasan tersebut sangat memberatkan.

Harusnya tidak perlu dibatasi, ya?

Secukupnya Pemerintah tidak perlu memberikan batasan terhadap pembelian bahan bakar tersebut sepanjang itu diperlukan untuk kepentingan bisnis. Akan mestinya Pemerintah memberikan perbedaan bidang apa saja yang dibatasi dan tidak.

Kalau pemerintah memberikan batasan atas pembelian bahan bakar minyak maksimal 50 liter, tentu kami akan keberatan pada saat operasional menjalankan

bisnis.
Maksud Anda, jika untuk bisnis tidak perlu ada pembatasan?

Kami berharap Pemerintah tidak membatasi sepanjang itu untuk kepentingan dan keperluan dunia usaha. Kenapa demikian? Karena kegiatan atau operasional bisnis itu untuk menunjang produktivitas yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kalau kita dibatasi pembelannya, dikhawatirkan akan terjadi pengurangan, penurunan atau istilahnya turbulensi terhadap produktivitas. Dampaknya terjadi penurunan terhadap ekonomi. Oleh karena itu, kami tidak berharap seperti itu.

Pemerintah melalui bapak Presiden berharap ada pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kalau kami dibatasi, maka dikhawatirkan per-

tumbuhan ekonomi yang diharapkan itu tidak tercapai.
Memurut Anda, apa dampak dari pembatasan tersebut terhadap dunia usaha?

Dengan kebijakan pembatasan pembelian BBM, dikhawatirkan akan terjadi penurunan pengiriman di bidang ekspedisi dan di bidang transportasi. Pelaku usaha tentu akan keberatan karena akan berdampak terhadap pertumbuhan usaha di sektor transportasi atau ekspedisi.

Akibatnya, banyak pengiriman barang yang tertunda karena kekurangan bahan bakar. Karena itu, kami mohon kepada Pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan atau mempertimbangkan kembali tentang pembatasan pembelian bahan bakar minyak, terutama untuk sektor-sektor bisnis. ■ REN